

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Jakpro: Tarif Sudah Sesuai Pergub

Gambir, Warta Kota

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mempertanyakan massa yang tergabung dalam Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) yang sempat berunjuk rasa di Balai Kota DKI pada Senin (20/2).

Perseroan daerah merasa tidak mengenal mereka yang berjumlah 75 kepala keluarga (KK), tetapi mengetahui warga Kampung Bayam berjumlah 123 KK.

"Kami turut mempertanyakan siapa sebenarnya PWKB yang mengklaim berjumlah 75 KK. Sebab, terkait Kampung Susun Bayam (KSB), Jakpro hanya mengetahui warga Kampung Bayam yang berjumlah 123 Kepala Keluarga berdasarkan Surat Wali Kota Jakarta Utara Nomor e-1076/PU/04.00 tentang rekomendasi hasil verifikasi," kata VP Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif berdasarkan keterangan, Rabu (22/2).

Setelah itu, kata Syachrial, Jakpro menindaklanjuti surat tersebut, sebagai bagian dari 'keistimewaan warga' yang akan menghuni KSB. Namun, dalam surat tersebut dijelaskan, terkait pengelolaan dan kepenghunan akan didiskusikan lebih lanjut.

Sementara itu, tarif sebesar pada rentang Rp 615.000 – Rp 765.000 disesuaikan dengan lantainya sudah mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. "Jadi, persoalan tarif harusnya tidak jadi masalah," ucapnya.

Syachrial mengatakan, perlu dipahami bahwa lahan yang dibangun untuk KSB bukanlah milik Jakpro tapi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Karena itu, terkait tindak lanjut atas pengelolaan dan pemanfaatan KSB, Jakpro perlu mengantongi sejumlah kelengkapan administrasi.

"Saat ini, Jakpro sedang mempercepat kelengkapan administrasi tersebut. Jakpro akan terus mengabarkan perkembangannya, baik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta ataupun warga Kampung Bayam," jelasnya.

Syachrial menambahkan, tidak ada proses menggusur dalam aksi permukiman kembali warga setempat. Program ini adalah Resettlement Action Plan (RAP) yang turut melibatkan pihak independen yang kredibel.

Tujuannya agar program RAP tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Sejak awal program berlangsung, Jakpro mengedepankan dialog dan musyawarah dengan warga pada setiap keputusan, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan masyarakat terdampak.

"Oleh karena itu, Jakpro meyakini tidak ada proses menggusur dalam konteks pemukiman warga Kampung Bayam. Justru, warga secara sadar bersedia tanpa paksaan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Hal itu berdasarkan dokumen serah terima dana kompensasi," ungkapnya.

Sementara, salah seorang warga Kampung Bayam, Astuti, berharap dapat segera menempati Kampung Susun Bayam yang telah dijanjikan pemerintah. Pasalnya, hingga kini ia dan sejumlah warga masih menempati tenda yang mereka buat di depan stadion utama Jakarta International Stadium (JIS).

Astuti mengaku khawatir tetap tak dapat menempati Kampung Susun Bayam hingga Hari Raya Idulfitri mendatang. "Maunya bisa masuk sebelum lebaran Idulfitri. Masa kita mau tidur di jalan terus," kata Astuti, Selasa (21/2). (faf/m38)